

BAB III

GAMBARAN UMUM KONFLIK OSSETIA SELATAN DAN GEORGIA

Konflik antara pemerintah Georgia dan separatis Ossetia telah melanda wilayah yang dikenal saat ini sebagai Ossetia Selatan sejak awal 1990-an. Terkadang konflik ini meletus menjadi peperangan habis-habisan. Di lain waktu, statusnya telah menjadi “konflik beku”. Meski demikian, konflik di Ossetia selatan belum sepenuhnya terselesaikan. Pada bab ini penulis akan berusaha menjelaskan karakteristik dominan konflik Ossetia Selatan dan memberikan gambaran umum konflik tersebut. Untuk melakukannya, pertama-tama penulis akan memberikan informasi umum tentang zona konflik, dan juga dengan memberikan sejarah singkat konflik. Lalu, penulis akan memberikan penyebabnya. Dan yang terakhir menjabarkan dampak dari konflik tersebut.

A. Sejarah Konflik Georgia-Ossetia Selatan

Konflik antara Georgia dengan Ossetia Selatan sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1989. Konflik tersebut bisa terjadi karena dipicu dari rasa nasionalisme yang sangat tinggi dari kedua belah pihak. Sebelum itu, kedua etnis tersebut hidup secara damai bahkan interaksi pernikahan antara keduanya sangat tinggi. Pada saat Revolusi 1917 Georgia berada di bawah kekuasaan kelompok Menshevik yang berseberangan dengan kelompok Bolshevik di Moskow. Dengan memanfaatkan posisi Bolshevik yang pada saat itu sedang lemah, kelompok Menshevik mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Georgia pada tanggal 26 Mei 1918. Dengan berpisahnya Georgia dari Uni Soviet sebagai akibatnya, Ossetia Selatan terpisah secara legal formal dari saudara-saudaranya di Ossetia Utara. Rakyat Ossetia Selatan merasa di perlakukan secara diskriminatif oleh Georgia dan menyuarakan keinginannya untuk bergabung dengan Ossetia Utara, namun hal ini diinterpretasikan oleh Tsibili sebagai dukungan terhadap kelompok Bolshevik (Group, 2004). Pemerintah

Menshevik mengirimkan tentara nasional dan tentara regulernya ke Tskhinvali (ibukota Ossetia Selatan) untuk menghentikan kerusuhan tersebut. Dari insiden itu, sekitar 5.000 jiwa etnis Ossetia meninggal dan lebih dari 13.000 penduduk sipil mati akibat kelaparan dan wabah penyakit. Insiden ini menyebabkan rasa permusuhan yang berlanjut antara Ossetia Selatan dan Georgia hingga saat ini.

Gambar 1 Penyebaran Etnis di Kaukasus



Selama era Uni Soviet, hubungan antara etnis Georgia dengan etnis Ossetia kurang harmonis dan sering kali terjadi persaingan diantara kedua belah pihak. Georgia beranggapan bahwa etnis Ossetia yang bermukim di Ossetia Selatan tidak berhak mendapatkan keuntungan yang di dapatkan dari sektor ekonomi, sedangkan di lain pihak mereka tidak mendapatkan keuntungan pada sektor politik jika dibandingkan dengan saudara mereka yang berada di wilayah Rusia (Ossetia Utara) dan penduduk di Abkhazia.

Sebuah gerakan yang dinamakan *Ademon Nykhas* dibentuk pada tahun 1988 dengan tujuan untuk menggalang persatuan rakyat demi mendapatkan kemerdekaan Ossetia

Selatan. Mereka mencoba meminta menaikkan status wilayah Ossetia Selatan menjadi Otonomi Republik di dalam wilayah Georgia. Pada tanggal 10 November dewan kota SOAO (*South Ossetia Autonomous Oblast*) mengajukan permohonan untuk merubah statusnya menjadi Otonomi Republik, tetapi hal ini ditolak oleh Georgia dengan mentah-mentah (Cornell, *Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus*, 2001, p. 4).

Belum selesai permasalahan mengenai pengakuan wilayah, timbul masalah baru yaitu bahasa. Pada tahun 1989 pemerintah menetapkan bahasa Georgia sebagai bahasa resmi pemerintah di seluruh wilayah Georgia, mendengar kebijakan tersebut etnis Ossetia beraksi dengan meminta bahasa Ossetia sebagai bahasa resmi di wilayah otonomi Ossetia Selatan. Kedua belah pihak beberapa kali sudah berusaha untuk meredam konflik dengan menggelar forum umum, tapi usahanya tersebut ternyata malah menimbulkan banyak permasalahan baru hingga menelan korban jiwa.

Pada masa kepemimpinan Gorbachev hubungan antara Georgia dan Ossetia Selatan menemui permasalahan yang makin serius. Sebuah insiden terjadi pada tanggal 9 April 1989, yang memicu gerakan nasionalisme Georgia, ternyata juga memicu gerakan yang sama yang dibentuk di Ossetia Selatan. Selama musim semi dan musim panas tahun 1989, Georgia dan Ossetia Selatan terlibat dalam “perang kebijakan” yaitu ketika Tbilisi mengeluarkan kebijakan yang menetapkan bahasa Georgia merupakan satu-satunya bahasa resmi yang digunakan di seluruh negara dan Ossetia Selatan membalas dengan mengeluarkan peraturan yang menetapkan bahasa Ossetia sebagai bahasa resmi di wilayah tersebut (Cornell, *Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus*, 2001, p. 153).

Pada tanggal 10 November 1989, Ossetia Selatan secara sepihak menyatakan telah bersatu dengan Ossetia Utara yang berada dalam wilayah Rusia. Keesokan harinya Georgia

memberikan penjelasan bahwa pemerintahannya tidak mengakui sikap Ossetia Selatan tersebut dan menyatakan bahwa Ossetia Selatan masih merupakan bagian dari Georgia. Dan akhirnya konflik tidak bisa dihindari, pada tanggal 23 November 1989 Gamsakhurdia bersama dengan Gumbaridze memimpin sekitar 15.000 pasukan untuk menuju Tskhinvali untuk melakukan perundingan dalam rangka melindungi etnis Georgia yang berada di wilayah Ossetia Selatan. Namun kelompok Georgia berhasil ditahan di perbatasan Georgia-Ossetia Selatan oleh gabungan rakyat dan milisi Ossetia Selatan serta tentara Soviet untuk tidak masuk ke wilayah Ossetia Selatan. Insiden penahanan ini akhirnya menimbulkan bentrok dan menimbulkan 6 korban tewas, 24 luka ringan dan 140 lainnya mendapatkan perawatan serius. Peristiwa ini mendorong *Ademon Nykhas* untuk mengirim petisi ke Moskow dengan tujuan penyatuan kembali Ossetia Selatan dengan Utara, namun petisi ini tidak ditanggapi, karena Moskow sedang menghadapi masalah yang lebih besar (Cornell, *Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus* , 2001, p. 154).

Selama awal tahun 1990, hubungan antara Georgia dengan Ossetia Selatan cenderung lebih stabil karena para elit politik Georgia sedang mengalami masa sulit dan sedang menata masa depan negaranya. Namun kestabilan tersebut ternyata tidak dapat bertahan lama, karena pada Agustus 1990 keduanya kembali berseteru setelah parlemen Georgia mengeluarkan peraturan baru bahwa partisipasi partai daerah dalam pemilu legislatif yang akan dilangsungkan pada bulan Oktober 1990 tidak diperbolehkan. Peraturan ini secara efektif menutup kemungkinan bagi *Ademon Nykhas* atau organisasi daerah lainnya untuk memiliki suara di parlemen (Cornell, *Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus* , 2001, p. 154).

Dengan naiknya Gamsakhurdia menjadi ketua parlemen Georgia pada pemilu bulan Oktober 1990, hak-hak masyarakat etnis Georgia di wilayah Ossetia Selatan terus

diperjuangkan. Hal tersebut bisa terjadi juga dikarenakan pendukung Gamaskhurdia banyak yang berasal dari wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan (Cornell, *Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus* , 2001, p. 154). Georgia beranggapan bahwa wilayah Ossetia Selatan di jadikan alat oleh Rusia untuk membuat keadaan di Georgia tidak stabil. Namun sebenarnya kedua wilayah tersebut ingin memisahkan diri dari Georgia karena memang mereka berbeda dan menderita dengan pemaksaan untuk menganut paham bahasa, budaya maupun politik Georgia. Untuk mewujudkan impiannya tersebut, pihak Ossetia Selatan meminta bantuan Rusia karena mereka merasa Rusia lebih memiliki kesamaan secara etnis dibandingkan dengan Georgia. Pemerintah Georgia selalu menuduh bahwa keberadaan kelompok separatis yang ada di wilayah Ossetia Selatan mendapatkan dukungan dari Rusia, terlebih ketika kedua wilayah tersebut menetapkan bahasa Rusia sebagai bahasa utama yang digunakan.

Pada tanggal 9 Desember 1990, Ossetia Selatan menyelenggarakan pemilu sendiri dengan maksud memilih anggota parlemen dari “Republik” baru ini. Dua hari kemudian parlemen “Republik” Ossetia Selatan ini memilih untuk berada dibawah otoritas Moskow. Tak lama setelah penyelenggaraan itu, Gamaskhurdia menanggapi dengan membatalkan hasil pemilu tanggal 9 Desember, dengan menghapus status *autonomous oblast* Ossetia Selatan dan menyatakan keadaan darurat di wilayah tersebut. Gamaskhurdia kemudian memerintahkan blockade terhadap Ossetia Selatan dan secara resmi memulai perang Georgia-Ossetia Selatan ketika ia memerintahkan pasukannya untuk menduduki Tskhinvali pada bulan Januari 1991 (Group, 2004). Pemerintah Georgia menetapkan situasi darurat di wilayah tersebut dan mengangkat komandan tentara dalam negeri Georgia untuk menjabat sebagai walikota Tskhinvali.

B. Keterlibatan Rusia Pada Konflik Georgia-Ossetia Selatan

Pada awal tahun 1990-an, gerakan separatis agresif dibentuk pihak Ossetia Selatan dan gerakan tersebut didorong dan didukung penuh oleh Federasi Rusia. Aksi dari gerakan separatis itu adalah memicu konfrontasi bersenjata dimana kekuatan militer Federasi Rusia berpartisipasi secara langsung, bersama dengan kelompok-kelompok kriminal setempat. Konfrontasi ini menghasilkan pembersihan etnis Georgia dan kekacauan di wilayah perbatasan Georgia-Ossetia Selatan. Lalu pada tahun 1992 dan 1994 diadakan perjanjian gencatan senjata untuk kedua belah pihak. Pada tahun 1995 situasi di Georgia mulai stabil, tidak ada konflik secara langsung antara pihak Georgia dengan kelompok separatis Ossetia. Namun konflik separatis di wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan tetap tidak terselesaikan (Security).

Kerusuhan yang terjadi antara Rusia-Georgia ini adalah akibat dari kepemimpinan presiden Gamsakhurdia yang semakin otoriter dan paranoid. Dari situ timbul lah perpecahan antara Gamsakhurdia dengan sekutunya, seperti Tengiz dan Jaba Ioselani. Kitovani dan Ioselani adalah pemimpin militer yang sedikit banyak ikut berperan dalam perang dengan Ossetia Selatan. Kitovani adalah pemimpin Garda Nasional dan Ioselani adalah pemimpin dari satuan paramiliter *Mkhedrioni* (penunggang kuda) yang terkenal karena ketangguhannya. Bergabungnya kedua orang ini ke pihak oposisi menyebabkan perpecahan ini meningkat menjadi perang saudara menjelang akhir tahun 1991 (Cornell, *Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus*, 2001, p. 157). Sepanjang bulan November dan Desember, Tsibilisi mejadi saksi pertumpahan darah antara tentara pemerintah dengan pasukan pemberontak pimpinan Kitovani dan Ioselani.

Pada tanggal 22 Desember 1991, pihak pemberontak memenangkan dan mendominasi wilayah Tsibilisi, memaksa Gamsakhurdia untuk melepaskan jabatannya dan hengkang dari Georgia. Gamsakhurdia akhirnya menuruti permintaan tersebut dan melarikan diri ke Armenia

pada tanggal 6 Januari 1992 yang kemudian mendapatkan suaka politik dari Presiden Djokhar Dudayev di Chechnya. Awal tahun 1992 merupakan waktu yang sulit bagi Georgia. Georgia sudah tidak lagi berada dibawah naungan Uni Soviet dan dalam kondisi yang mendekati anarki. Para pihak oposisi yang saat itu menguasai wilayah Georgia membentuk sebuah Dewan Negara untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sehari-hari, namun tidak berhasil karena tidak dapat mengendalikan kelompok-kelompok paramiliter yang melakukan penjarahan terhadap penduduk sipil. Kondisi pemerintahan yang pada saat itu mengalami keterpurukan akhirnya memutuskan agar Dewan Negara untuk mengundang kembali Eduard Shevardnadze untuk kembali ke Georgia dan memimpin kembali negara kelahirannya dan mengatasi situasi dalam negeri yang semakin memburuk (Cornell, *Autonomy and Conflict: Ethnoterritoriality and Separatism in The South Caucasus-Cases in Georgia*, 2002, p. 166).

Keputusan Dewan Negara untuk mengundang Shevardnadze kembali ke Georgia ternyata merupakan langkah yang tepat, terbukti dengan tindakannya yang melakukan kunjungan Tskhinvali untuk meredakan ketegangan antara Georgia dan Ossetia Selatan (Cornell, *Autonomy and Conflict: Ethnoterritoriality and Separatism in The South Caucasus-Cases in Georgia*, 2002, p. 166). Situasi di Ossetia Selatan pada saat itu sebenarnya sudah mulai kondusif dan stabil, namun Shevardnadze tetap gagal dalam mengendalikan kelompok-kelompok paramiliter tersebut, sehingga pada bulan April perang kembali terjadi lagi di Tskhinvali dan para militer Georgia juga terlibat dalam insiden pembantaian terhadap penduduk sipil Ossetia yang sedang mengungsi (Cornell, *Autonomy and Conflict: Ethnoterritoriality and Separatism in The South Caucasus-Cases in Georgia*, 2002, p. 167).

Walaupun Rusia juga mengalami krisis domestik pada saat yang bersamaan, namun hal itu tidak mengurungkan Moskow untuk hanya berdiam diri dan membiarkan semua berjalan dengan apa adanya. Rusia bahkan berperan dalam menentukan awal dan akhir dari perang antara Georgia dan Ossetia Selatan tersebut. Satu hal yang pasti adalah bahwa dari sudut

pandang Georgia, Rusia merupakan pihak ketiga yang selalu mencampuri urusan dalam negeri dan merupakan penyebab dari meningkatnya konflik dengan Ossetia Selatan (Cornell, *Autonomy and Conflict: Ethnoterritoriality and Separatism in The South Caucasus-Cases in Georgia*, 2002, p. 167). Sebelumnya telah disebutkan bahwa keterlibatan awal Rusia dalam konflik di Georgia adalah ketika sebuah resimen tentara Soviet membantu melindungi Tskhinvali dari ribuan pendukung Gamsakhurdia pada tahun 1989. Rusia kemudian juga secara tidak langsung terlibat dalam perang saudara pada tahun 1991. Pada saat itu, pasukan pemberontak yang menggulingkan Gamsakhurdia diduga memperoleh persenjataan dari pangkalan militer Soviet yang tersebar di wilayah Georgia (Cornell, *Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus*, 2001, p. 336).

Intervensi Rusia menjadi lebih terbuka setelah eskalasi konflik pada bulan April dan Mei 1992. Para politisi garis keras seperti Ketua Parlemen Rusia, Ruslan Khasbulatov dan Wakil Presiden Aleksandr Rutskoi mengeluarkan pernyataan bahwa tindakan yang dilakukan Georgia merupakan kekerasan yang harus ditangani secara serius serta melakukan dukungan penuh untuk keinginan Ossetia Selatan yang ingin bergabung dengan Rusia (Cornell, *Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus*, 2001, p. 157). Memasuki bulan Juni kedua negara telah berada di ambang peperangan. Pasukan udara Rusia telah dikerahkan untuk melancarkan serangan terhadap tank dan kendaraan tempur milik Garda Nasional Georgia, sementara satuan militer Rusia dan relawan dari republik-republik Kaukasus Rusia berhimpun di Ossetia Utara. Ossetia Utara juga mendukung saudara-saudaranya yang berada di selatan dengan menghentikan suplai gas alam dari Rusia ke Georgia serta melobi Moskow agar segera mengerahkan pasukannya yang telah terhimpun (Cornell, *Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus*, 2001, p. 157).

Shevardnadze dan Presiden Rusia pada saat itu, Boris Yeltsin, menyadari bahwa perang yang awalnya merupakan konflik internal ini dapat meluas hingga ke tingkat regional, oleh karena itu kedua pemimpin ini sepakat untuk menghentikan ketegangan dengan menandatangani perjanjian gencatan senjata di kota Sochi, Rusia, pada tanggal 22 Juni 1992 yang dihadiri oleh pemimpin Ossetia Utara dan Selatan. Perjanjian ini pada prinsipnya ‘membekukan’ konflik antara Georgia dan Ossetia Selatan hingga waktu yang tak ditentukan (Cornell, *Autonomy and Conflict: Ethnoterritoriality and Separatism in The South Caucasus-Cases in Georgia*, 2002, p. 167). Untuk menjaga agar perjanjian tersebut tetap bertahan, kedua negara sepakat untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian *Joint Peace Keeping Force* (JPKF) yang terdiri dari personil Rusia, Georgia dan Ossetia (Utara dan Selatan). Pasukan ini mulai aktif pada bulan Juli dan melakukan patrol di zona konflik, yaitu area dalam radius 15 km dari Tskhinvali.

Perjanjian ternyata berhasil untuk mengakhiri perang di Ossetia Selatan tanpa deklarasi kemenangan salah satu pihak, namun faktanya Georgia merupakan pihak yang ‘kalah’ karena walaupun secara *de jure* Ossetia Selatan masih diakui sebagai bagian dari wilayah territorial tapi secara *de facto* Ossetia Selatan telah berhasil melepaskan diri dari control Tsibilisi. Selain itu, Georgia juga harus menerima kenyataan bahwa personil militer Rusia yang menjadi pemimpin JPKF di perbatasan yang terletak hanya beberapa jam dari Tsibilisi (Cornell, *Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus*, 2001, p. 340). Kehadiran JPKF relatif berhasil menjaga perdamaian di Ossetia Selatan karena menjadi penghalang bagi Georgia untuk menyelesaikan masalah Ossetia Selatan secara militer.

Tapi ternyata lagi-lagi situasi stabil tidak dapat bertahan lama di kedua belah pihak. Pergantian kekuasaan dari Shevardnadze ke Saakashvili merupakan titik balik terjadinya persetujuan kembali antara Georgia dengan Rusia. Saakashvili dipandang sebagai

seorang reformis dan pejuang anti-korupsi yang mampu membawa perubahan bagi Georgia setelah 11 tahun berada dibawah pemerintahan Shevardnadze yang lemah dan korup. Mikhail Saakashvili yang pada saat itu berusia 36 tahun ketika menjadi Presiden, mengisi pemerintahannya dengan orang-orang yang relatif masih muda, sehingga menimbulkan kesan pemerintahan yang dinamis dan inovatif untuk membuat perubahan yang lebih baik bagi Georgia.

Setelah resmi menjabat sebagai Presiden Georgia, Saakashvili melakukan manuver untuk mereformasi di bidang ekonomi dan politik, membangun Georgia menjadi sebuah negara yang kuat dan demokratis, serta menjalin hubungan yang lebih erat dengan Barat. Untuk mewujudkan impian itu, Georgia merapat dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Barat dan mengajukan diri menjadi anggota NATO dan Uni Eropa, namun tanpa mengganggu hubungan bertetangga yang baik dengan Rusia (Group I. C., 2007).

Pada bulan Mei 2004, Presiden Saakashvili mulai mencoba untuk mengambil alih pemerintahan Ossetia Selatan dengan memerintahkan satuan kepolisian dan pasukan khusus Georgia untuk melakukan pemberantasan penyelundupan di wilayah Ossetia Selatan. Penyelundupan merupakan masalah besar bagi Georgia, namun bagi Ossetia Selatan cara tersebut merupakan cara yang paling efektif mengingat Ossetia Selatan tidak memiliki sistem perdangan yang mapan (Group I. C., 2007, p. 10).

Dengan kehadiran pasukan yang bukan termasuk dalam komando JPKF ini, pemerintah dan penduduk Ossetia Selatan menganggap hal ini sebagai tanda dari pemerintahan Georgia untuk 'mencairkan' konflik yang sempat dibekukan selama 12 tahun. Pasukan Georgia kembali mengalami bentrokan bersenjata dengan milisi Ossetia Selatan dan pada bulan Juli dan Agustus 2004, bentrokan ini menjadi perang terbatas setelah kedua belah pihak saling bertukar tembakan senjata ringan dan mortar di zona konflik (Nygren, *The Rebuilding Greater Russia: Putin's Foreign Policy Toward the CIS Countries*, 2008, pp. 145-147).

Konflik yang terjadi pada tahun 2004 tersebut dibawa oleh Presiden Mikhail Saakashvili hingga ke dunia internasional dengan membawa isu bahwa Rusia merupakan dalang dibalik konflik yang terjadi. Di hadapan para pendukungnya, Saakashvili mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Ossetia Selatan merupakan masalah antara Georgia dengan Rusia. Sejak saat itu, hubungan antara Georgia dengan Rusia menjadi semakin renggang dan memburuk setelah perang yang terjadi pada tahun 2008. Pada bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 8 ini hari, pemerintah Georgia memutuskan untuk menyelesaikan masalah di Ossetia Selatan dengan melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Tskhivali. Rusia yang sudah mengantisipasi akan terjadinya serangan dari Georgia, langsung masuk ke wilayah Ossetia Selatan melalui terowongan Roki yang menghubungkan antara Ossetia Utara dan Selatan. Ini adalah intervensi militer pertama yang dilakukan oleh Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet.

C. Keterlibatan Amerika Serikat Di Konflik Georgia-Ossetia

Pemerintah AS sangat mendukung pemerintahan Georgia yang baru, yang dipimpin oleh Presiden Sakaashvili, terutama pada saat Georgia memberikan dukungannya pada kebijakan luar negeri AS contohnya saat perang di Irak. Rezim Presiden sakaashvili juga menciptakan gambaran negara Georgia yang demokratis sebagai usahanya untuk mendapatkan dukungan politik dari AS. Tidak sedikit para pejabat pemerintahan di Georgia yang memiliki pengetahuan yang banyak mengenai sistem pemerintahan AS yang diaplikasikan ke Georgia.

Program pemerintahan Georgia banyak yang diberi dukungan oleh pemerintah AS. *Georgia Train and Equip Programme (GTEP)* dibentuk pada 29 April 2002 oleh Departemen Pertahanan Georgia (*Security, Georgia Train and Programme*). Program ini mendapat bantuan dari AS untuk membantu pemerintah Georgia dalam menghadapi terorisme yang saat itu sedang di alami oleh Georgia dia Pankisi Georgia. GTEP diharapkan dapat melengkapi upaya-upaya melawan terorisme yang telah ada di dunia internasional dan dapat meningkatkan stabilitas di kawasan kaukasus. GTEP dibentuk berdasarkan pada *military-to-*

military relationship. GTEP juga menjadi salah satu bukti dukungan yg serius dari AS terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Georgia. Melalui GTEP Georgia mendapat peralatan militer dari AS. Peralatan tersebut meliputi seragam bagi personil militer AS, senjata dan amunisi, peralatan komunikasi, perlengkapan pelatihan, peralatan medis, dan berbagai material untuk konstruksi.

Pelatihan GTEP dilaksanakan dengan dibantu oleh *U.S. Special Operations Forces* dan *U.S. Marine Corps Forces* dari bulan Mei 2002 sampai dengan Mei 2004. Selama masa pelatihan ini sekitar 2.600 tentara Georgia termasuk kepala staff dan luma divisi menerima pelatihan. Selain GTEP, pemerintah Georgia juga membentuk program *Georgia Sustainment and Stability Operations Programme* (SSOP) yang bertujuan untuk melatih pasukan Georgia dalam menjaga perdamaian, salah satunya dalam misi perdamaian *Operation Iraqi Freedom* di Irak (Security, Georgia Sustainment and Stability Programme). SSOP ini dibentuk untuk melanjutkan program GTEP yang sukses bertujuan untuk merepresentasikan standar Barat dalam pelatihan pasukan Georgia. Pelatihan SSOP berlangsung selama 18 bulan dengan menghabiskan dana sebesar 60 juta USD.

Selain di bidang militer, AS juga member dukungan kepada Georgia dalam bidang ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan Georgia dan juga untuk memastikan posisi Georgia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang terbilang cepat. Secara garis besar komitmen AS terhadap Georgia adalah sebagai berikut:

1. AS akan memberikan bantuan ekonomi pada Georgia untuk mengembalikan ekonomi Georgia dan kebutuhan masyarakat Georgia. Pemberian bantuan akan ditujukan untuk pembangunan jangka panjang yang ditujukan untuk pemerintah Georgia, rehabilitasi infrastruktur, pembiayaan sektor swasta, bantuan kemanusiaan dan pembangunan-pembangunan lainnya.

2. Bantuan kemanusiaan untuk membantu masyarakat Georgia yang terkena dampak invasi. Bantuan tersebut berupa bantuan makanan dan obat-obatan.
3. AS bekerja sama dengan beberapa bank untuk memformulasikan beberapa rencana yang ditujukan untuk kebutuhan rekonstruksi Georgia dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi Georgia. Sejak tahun 2007 Georgia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. AS mendukung strategi Georgia dengan *International Monetary Fund* (IMF) untuk mendorong kembali rasa kepercayaan investor terhadap Georgia.
4. AS akan memperdalam hubungan perdagangan dan investasi dengan Georgia. AS akan memperluas kerangka kerjasama perdagangan dan investasi dengan Georgia, mengeksplorasi kemungkinan yang dapat memperluas kerjasama investasi bilateral, menawarkan bentuk regulasi baru yang memungkinkan pasar AS untuk lebih mudah masuk di Georgia, dan sebaliknya. Kemudian berusaha untuk membantu Georgia mendapatkan investor, sehingga dapat memperbesar hubungan AS dan Georgia dalam komunitas bisnis (Government, 2008)